

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang senantiasa menjadi perhatian utama pemerintahan pada seluruh jenjang, baik dari tingkat daerah maupun nasional. Pengangguran adalah kondisi ketika angkatan kerja memiliki keinginan untuk bekerja namun belum memperoleh pekerjaan. Situasi ini dapat terjadi karena jumlah tenaga kerja yang ditawarkan di pasar melebihi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada waktu tertentu (Yuniarti & Imaningsih, 2022). Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya mencerminkan adanya inefisiensi dalam pendayagunaan sumber daya manusia yang tersedia, tetapi juga memberikan dampak yang luas cakupannya dalam berbagai dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Pengangguran di Indonesia sebagian besar berasal dari dua kelompok utama, yakni pengangguran usia muda dan pengangguran terdidik (Rizkia & Haryatiningsih, 2023). Investasi juga berdampak pada jumlah tenaga kerja yang digunakan, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan tingkat investasi akan menyebabkan harga barang dan jasa turut mengalami kenaikan (Hidayah & Seno Aji, 2022). Mengingat dampak yang ditimbulkan cukup luas dan multidimensional, pengurangan angka tingkat pengangguran senantiasa menempati posisi strategis dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang secara konsisten menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

sebagai salah satu dari indikator keberhasilan pembangunan nasional yang penting.

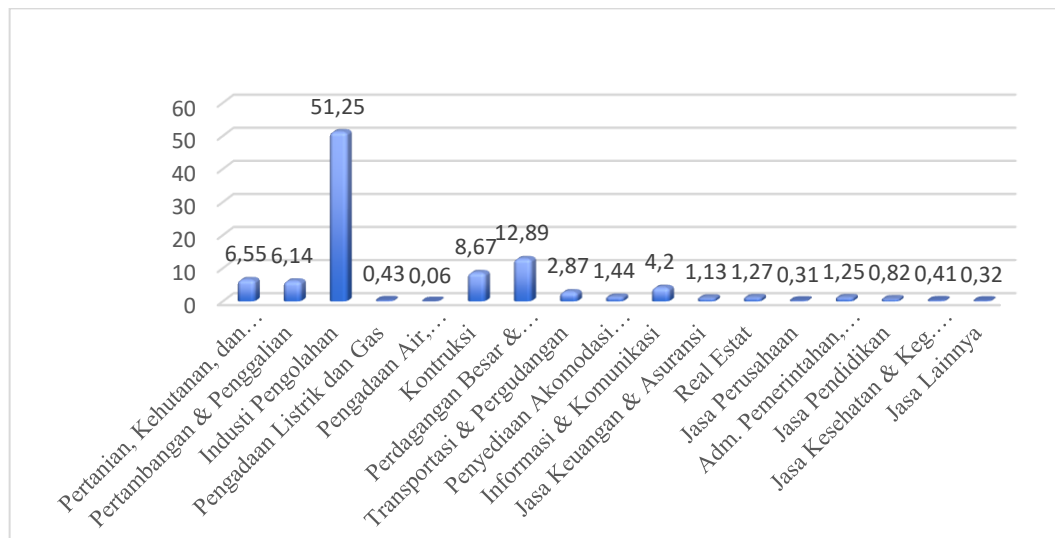
Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Tingkat Pengangguran terbuka di Indonesia menunjukkan tren yang dinamis dan berfluktuasi seiring dengan berbagai perubahan pada kondisi ekonomi domestik dan global. Pada periode awal penelitian ini yaitu tahun 2015, TPT nasional tercatat sebesar 5,81%, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2019 mencapai 5,28%. Akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat (Mifrahi & Darmawan, 2022). Kondisi tersebut berangsur membaik pasca pandemi dan mencapai 4,91% pada Agustus 2024 tingkat terendah dalam satu dekade terakhir. Meskipun tren TPT nasional secara umum menunjukkan perbaikan, dinamika pada Tingkat daerah justru jauh lebih beragam dan kompleks, sehingga data pada skala nasional tidak selalu mencerminkan realitas ketenagakerjaan yang sesungguhnya terjadi pada tingkat skala yang lebih rendah seperti kabupaten/kota. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa permasalahan pengangguran di Indonesia tidak selalu bersifat linear dan terus menuntut adanya kajian yang lebih mendalam, terutama pada tingkat daerah yang dimana dinamika ketenagakerjaannya lebih kompleks dan beragam.

Negara-negara maju umumnya menghadapi persoalan pengangguran yang lebih berkaitan dengan dinamika dunia dan aktivitas ekonomi, namun pada negara berkembang dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks seperti minimnya investasi, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan persoalan sosial politik negeri yang tidak stabil (Frisnoiry et al., 2024). Setiap wilayah memiliki karakteristik ekonomi,

kondisi demografis, dan struktur ketenagakerjaan yang sangat berbeda satu sama lain, sehingga faktor yang mempengaruhi TPT disutau wilayah tidak dapat sertamerta disamakan untuk ditetapkan sebagai faktor pada wilayah lainnya. Hal tersebut menekankan kajian empiris yang bersifat spesifik dan mendalam pada suatu wilayah sehingga temuan yang didapat dapat lebih akurat, sehingga dapat dijadikan pandangan untuk membuat rancangan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kabupaten Gresik tampil sebagai salah satu wilayah yang menarik disebabkan karena sifatnya kompleks untuk dikaji. Daerah yang dikenal sebagai salah satu pusat investasi terbesar di Jawa Timur, namun masih bergulat dengan tingginya angka pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang secara persisten ada diatas rata-rata angka pada Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Gresik secara geografis terletak pada bagian barat laut Kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur tersebut. Letak geografis yang dekat ini menempatkan Kabupaten Gresik sebagai bagian dari Kawasan metropolitan Gerbangkertosusila (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan), kawasan tersebut merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua setelah Jabodetabek. Posisi strategis ditunjang dengan akses infrastruktur yang sangat memadai, seperti tersedianya akses langsung dengan jalan tol Trans-Jawa, jaringan kereta api lintas utara Jawa, dan fasilitas Pelabuhan laut yang terintegrasi. Keunggulan lokasi Kabupaten Gresik dengan fasilitas yang ada menjadikannya sebagai salah satu lokasi paling ideal untuk pengembangan industri manufaktur, pengolahan, dan kegiatan logistik baik pada skala nasional maupun internasional.

Gambar 1.1 Distribusi PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2024

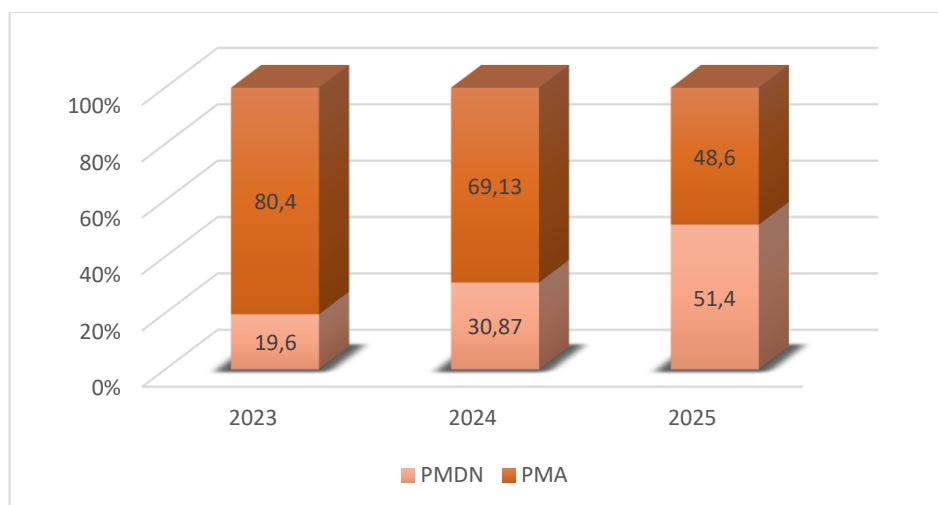


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik diolah, 2024

Keunggulan posisi geografis Kabupaten Gresik mendorong berkembangnya industri berskala besar yang telah beroperasi selama puluhan tahun, seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang berdiri sejak 1957 sebagai produsen semen terbesar di Indonesia, PT Petrokimia Gresik sebagai salah satu produsen pupuk dan bahan kimia terbesar di Asia Tenggara, serta fasilitas pemurnian dan peleburan tambang PT Freeport Indonesia yang termasuk terbesar di dunia. Fondasi industrialisasi yang kuat ini menjadi daya tarik utama bagi peningkatan arus investasi dari tahun ke tahun. Hal tersebut tercermin pada struktur PDRB Kabupaten Gresik tahun 2024 yang didominasi sektor industri pengolahan sebesar 51,25%, jauh melampaui sektor lain seperti perdagangan 12,89%, konstruksi 8,67%, serta pertambangan dan penggalian 6,14%, sebagaimana terlihat pada grafik distribusi PDRB. Dominasi ini menunjukkan tingginya ketergantungan ekonomi Gresik pada sektor industri. Perkembangan investasi semakin pesat sejak penetapan *Java Integrated Industrial and Ports*

Estate (JIPE) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik pada 2021 yang dikembangkan di lahan lebih dari 3.000 hektare dengan fasilitas pelabuhan terintegrasi, akses tol, pembangkit listrik, dan infrastruktur pendukung lainnya. Proyek strategis seperti smelter tembaga PT Freeport Indonesia yang diresmikan pada 2024 serta pabrik foil tembaga PT Hailiang Nova Material Indonesia semakin memperkuat posisi Gresik. Menurut laporan Dewan Nasional KEK (2024), KEK Gresik telah menarik investasi kumulatif sekitar Rp92,8 triliun dan menyerap sekitar 39.656 tenaga kerja dari tahun 2021-2024, angka serapan yang cukup besar dan menegaskan perannya sebagai pusat hilirisasi industri dan tujuan investasi strategis di Indonesia.

Gambar 1.2 Presentase PMA dan PMDN Kabupaten Gresik 2022-2024

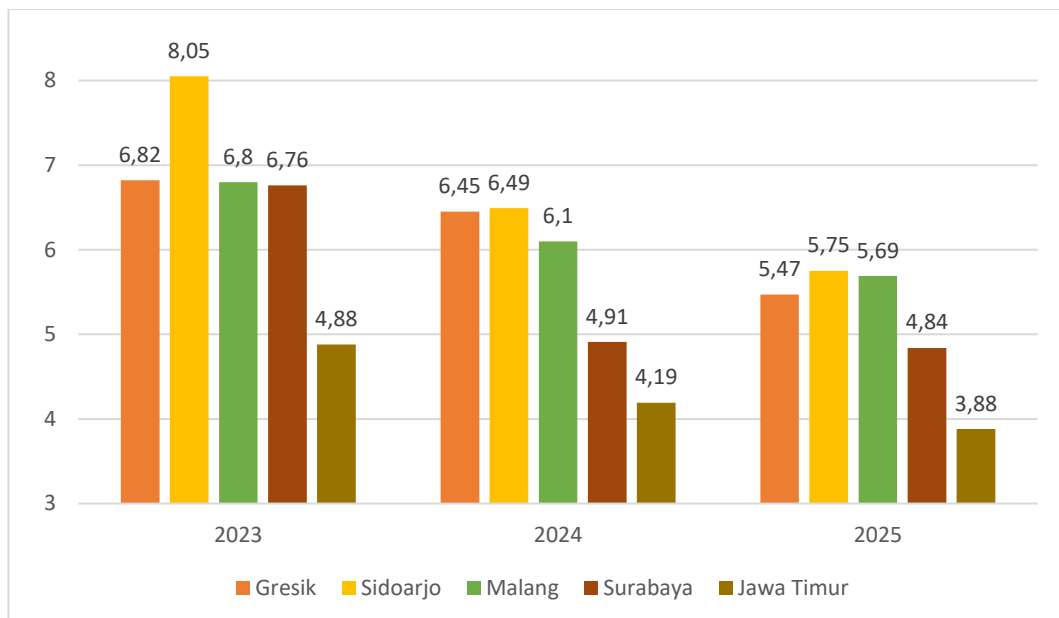


Sumber : DPMPTSP Kabupaten Gresik diolah, 2024

Struktur investasi di Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 2023–2024 didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) yang secara konsisten menguasai porsi terbesar dari total realisasi investasi. Pada tahun 2023, PMA mencapai 80,4% dari total investasi, kemudian menurun menjadi 69,13% pada

tahun 2024, dan kembali mengalami penurunan menjadi 48,6% pada tahun 2025. Sementara itu, kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) justru menunjukkan tren yang bergerak berlawanan arah, yakni dari 19,6% pada tahun 2023 menjadi 30,87% pada tahun 2024, serta mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 51,4% pada tahun 2025. Sepanjang periode 2023–2025, struktur investasi di Kabupaten Gresik bergeser dari dominasi modal asing (PMA) menjadi keunggulan modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2025.

Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Gresik, Sidoarjo, Malang, Surabaya, dan Jawa Timur Tahun 2023-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur diolah, 2025

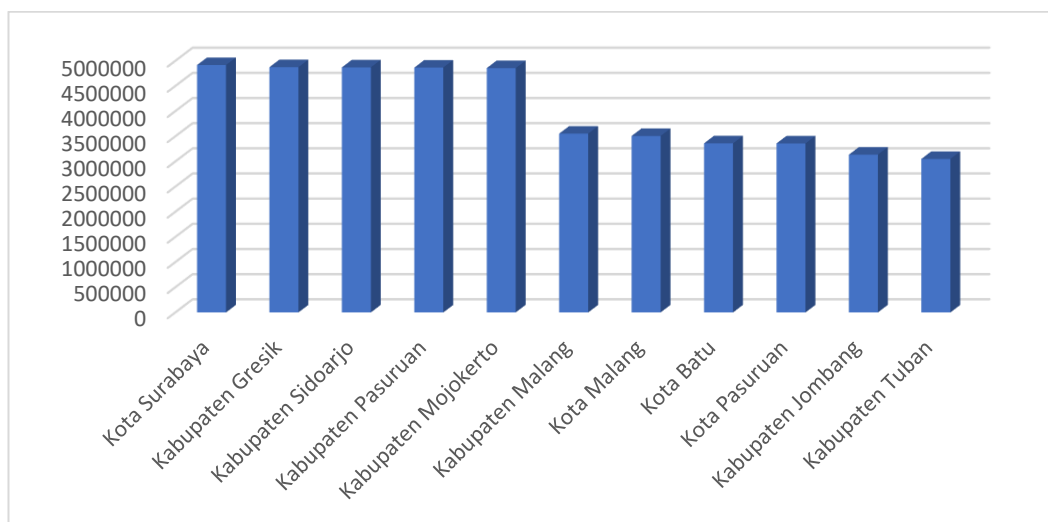
Dibalik keberhasilan pencapaian investasi yang begitu mengesankan tersebut, terdapat sebuah fenomena yang secara empiris sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah. Selama periode 2011-2025, TPT di seluruh wilayah menunjukkan tren penurunan yang konsisten, termasuk Kabupaten Gresik. TPT Gresik turun bertahap dari 6,82% pada 2023 menjadi 6,45% pada 2024, lalu 5,47% pada 2025. Meskipun

terus membaik, pada periode tersebut Gresik menempati urutan kedua TPT tertinggi di Jawa Timur, menunjukkan bahwa tingkat penganggurannya masih relatif lebih tinggi dibanding sebagian daerah lain. Meskipun seluruh wilayah mengalami perbaikan kondisi ketenagakerjaan, posisi Gresik yang masih relatif tinggi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam penciptaan lapangan kerja dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti empiris. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka terjadi akibat banyak perusahaan yang mengalami penurunan kinerja bahkan gulung tikar sehingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait (Firdaus & Sulistyowati, 2021)

Akar permasalahan fenomena tersebut mengarah pada karakteristik dominan investasi yang masuk ke Kabupaten Gresik. Investasi merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena mampu memperluas lapangan kerja dan menekan tingkat pengangguran. Pembangunan infrastruktur seperti pabrik, perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar, serta fasilitas ibadah dan wisata turut meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian (Edah & Amelia, 2021). Kenaikan nilai investasi saja tidak serta-merta mampu menurunkan tingkat pengangguran, terutama apabila investasi tersebut tidak difokuskan pada sektor-sektor yang bersifat padat karya (Rahim & Millia, 2025). Hal itu relevan untuk menjelaskan kondisi di Kabupaten Gresik, sebagaimana realisasi investasi menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik (2024) yang mencapai Rp37,9 triliun pada 2024 hanya berdampak pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 24.092 orang, rasio

serapan yang kecil dibandingkan dengan besaran nilai investasi yang ada. Rendahnya serapan tenaga kerja lokal dari arus investasi besar tersebut bahkan memicu penerbitan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022, yang secara mewajibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Gresik untuk mempekerjakan minimal 60% tenaga kerja lokal sebuah regulasi yang merupakan bukti nyata bahwa penyerapan tenaga kerja warga Gresik tidak terjadi secara otomatis dan proporsional dari derasnya arus investasi yang ada.

Gambar 1.4 10 Kota UMK Tertinggi di Jawa Timur 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur diolah, 2025

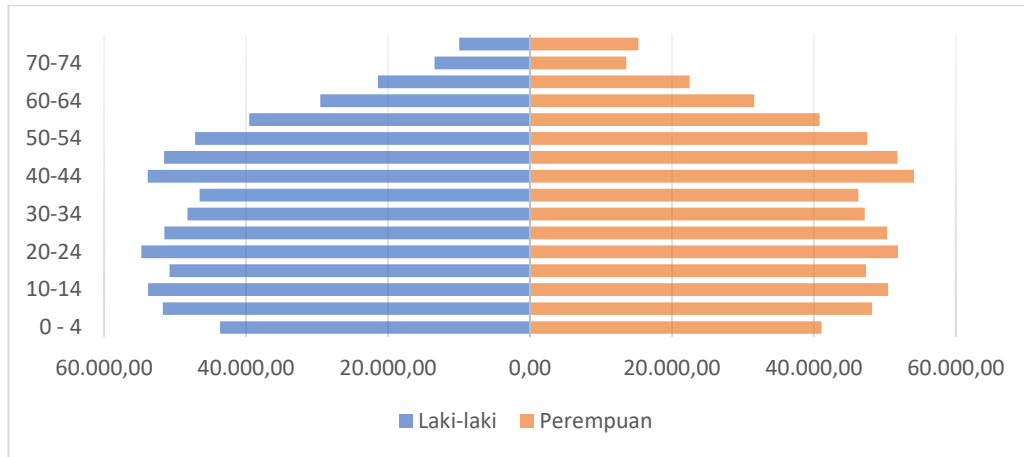
Berdasarkan data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Timur tahun 2025, Kabupaten Gresik menempati posisi tertinggi kedua dengan besaran UMK sebesar Rp4.874.133, hanya berada di bawah Kota Surabaya yang mencatatkan UMK sebesar Rp4.961.753. Disusul Kabupaten Sidoarjo Rp4.870.511, Kabupaten Pasuruan Rp4.866.890, dan Kabupaten Mojokerto Rp4.856.026. Sejumlah indikator ekonomi yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

pertumbuhan ekonomi, upah minimum pekerja (UMP), inflasi, dan faktor-faktor lainnya (Marliana, 2022). Besarnya disparitas UMK tersebut menjadikan Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah tujuan utama bagi angkatan kerja dari berbagai wilayah. Kenaikan upah minimum setiap tahun berpotensi menurunkan permintaan tenaga kerja di sektor formal, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap di sektor tersebut cenderung beralih dan bekerja di sektor informal (Baihawafi & Sebayang, 2023). Permasalahan lain adalah ketidaksesuaian antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan atau kualifikasi yang dipersyaratkan oleh pasar kerja. Meskipun permintaan tenaga kerja cukup tinggi, ketimpangan ini tetap dapat mendorong peningkatan angka pengangguran (Adriyanto et al., 2020). Tingginya UMK Gresik di satu sisi menjadikannya sebagai destinasi yang sangat diminati oleh angkatan kerja dari berbagai wilayah sehingga mendorong terjadinya arus migrasi masuk (*in-migration*), sementara di sisi lain berpotensi mendorong pelaku usaha untuk mengambil langkah efisiensi melalui pengurangan jumlah tenaga kerja atau penerapan otomatisasi dua tekanan berlawanan yang menjadikan UMK sebagai variabel yang relevan untuk diteliti.

Jumlah penduduk Kabupaten Gresik, berperan sebagai penentu besaran penawaran tenaga kerja yang memasuki pasar kerja dari waktu ke waktu. Lapangan pekerjaan merupakan sumber daya penting yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun pertumbuhan jumlah penduduk sering kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia, kesenjangan tersebut pada akhirnya menimbulkan pengangguran (Sembiring & Sasongko, 2019) Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gresik

tidak hanya bersumber dari pertumbuhan alami tetapi juga dari arus migrasi masuk yang dipicu oleh daya tarik UMK tertinggi kedua di Jawa Timur menjadikan tekanan dari sisi penawaran tenaga kerja semakin besar dari tahun ke tahun.

Gambar 1.5 Piramida Penduduk Kabupaten Gresik 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik diolah, 2025

Berdasarkan piramida penduduk tersebut komposisi penduduk Kabupaten Gresik tahun 2024 menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun), terutama pada rentang usia 20-44 tahun yang memiliki jumlah relatif besar baik laki-laki maupun perempuan. Kelompok usia 20-24 dan 40-44 tercatat sebagai salah satu yang paling tinggi, mencerminkan potensi bonus demografi. Sementara itu, proporsi usia muda (0-14 tahun) juga masih cukup besar, meskipun sedikit lebih kecil dibanding kelompok usia produktif, dan kelompok lansia (65+) relatif lebih kecil sehingga piramida cenderung berbentuk ekspansif menuju stasioner. Komposisi ini menunjukkan ketersediaan angkatan kerja yang melimpah, namun di sisi lain berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pasar kerja. Dengan dominasi penduduk usia produktif tersebut, tingkat pengangguran

terutama pada usia muda menjadi isu strategis, karena tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap secara optimal dapat berdampak pada peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan seluruh uraian permasalahan dan kondisi empiris yang telah dikemukakan di atas, terdapat urgensi akademis sekaligus urgensi kebijakan yang kuat untuk mengkaji secara kuantitatif pengaruh investasi, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik. Pemilihan rentang waktu 2011-2025 didasari atas pertimbangan bahwa periode tersebut mencakup berbagai dinamika ekonomi yang beragam, sehingga memberikan variasi data yang memadai untuk menghasilkan estimasi yang representatif dan reliabel. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik, serta menjadi masukan berbasis bukti (*evidence-based input*) yang bernilai bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih pro-penyerapan tenaga kerja lokal, kebijakan pengupahan yang berimbang, serta strategi pengelolaan kependudukan yang lebih terpadu. Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, penelitian ini mengangkat judul **"Analisis Pengaruh Investasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik?

2. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik?
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah ada pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik
2. Mengetahui apakah ada pengaruh Investasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik
3. Mengetahui apakah ada pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh upah minimum, investasi, dan jumlah penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sedangkan variabel independen meliputi Upah Minimum, Investasi, serta Jumlah Penduduk. Penelitian ini dibatasi hanya pada wilayah administratif Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan data *time series* tahunan dengan rentang periode 2011-2025 dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik dan lembaga terkait lainnya. Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif dengan metode analisis regresi

linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi pembangunan, khususnya terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tingkat kabupaten yang masih terbatas. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai ketenagakerjaan di daerah berbasis industri dengan investasi tinggi namun menghadapi pengangguran struktural.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan investasi, upah minimum, serta pengelolaan angkatan kerja yang lebih efektif. Bagi investor, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan perencanaan tenaga kerja. Sementara bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam analisis TPT berbasis data time-series tingkat kabupaten.